



**TANDA TANGAN.** Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus menandatangani penyerahan laporan yang dilakukan BPK RI di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (24/1). Syamsul Arifin/RK

## Kubu Raya Pelajari Hasil Pemantauan BPK RI

**KUBU RAYA-RK.** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar menyerahkan laporan pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Daerah Semester II tahun 2016. Terhadap pimpinan DPRD dan pimpinan Pemerintah Daerah se-Kalbar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (24/1). Sesuai pemantauan TLRHP sampai dengan semester II tahun 2016, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar telah menghasilkan 4.043 temuan. Dengan rekomendasi sebanyak 9.066 serta persentase penyelesaian tindaklanjut sebesar 71,93 persen. Persentase penyelesaian tindaklanjut meningkat sebesar 1,2 persen dari semester I tahun 2016 yang hanya mencapai 70,72 persen.

"Hal ini seiring dengan penerapan SiPTL

yang mulai disosialisasikan dan diterapkan pada semester II tahun 2016," ujar Kepala Sub Auditorat I BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Patrice L Sihombing saat menyerahkan berkas BPK RI ke seluruh pimpinan daerah se-Kalbar.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus berkesempatan menerima berkas TLRHP dari BPK RI. Semua temuan dari BPK RI akan ditindaklanjuti secepat mungkin.

"Kita akan segera melaksanakan tindak lanjut dari penerimaan berkas BPK. Karena untuk mendorong standar perbaikan seluruh laporan yang ada di daerah," ujar Wabup Hermanus.

Dalam hasil rekapitulasi tindaklanjut atas rekomendasi tersebut, Wabup menambahkan, telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah

sebesar Rp224,86 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp4,61 miliar dari penyetoran pada semester tahun 2016 yang baru mencapai 220,25 miliar.

Selain penyerahan laporan hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar juga menyerahkan laporan hasil pemantauan atas kerugian negara/daerah semester II tahun 2016.

"Adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak melakukan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan sebagai langkah represif agar daerah bisa mentaatinya," ucap Hermanus.

Wabup menambahkan, pihaknya akan terus menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut. "Kami akan pelajari dan terus melakukan perbaikan agar tidak ada temuan di lingkungan Pemerintahan Kubu Raya," ungkapnya. (sul)